



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SNKI STRATEGI
NASIONAL
KEUANGAN
INKLUSIF
Membangun Indonesia Sejahtera



Launching Implementasi Program Promise Impact tahap Ke-II

Dr. FERRY IRAWAN, S.E., M.S.E

**Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan**

**Sekretaris Dewan Nasional
Keuangan Inklusif**

Jakarta, 2 Maret 2023

TETAP WASPADA DAN ANTISIPATIF DENGAN KONDISI PELAMBATAN EKONOMI GLOBAL, MESKI PROYEKSI PENURUNAN TIDAK SEDALAM PERKIRAAN SEBELUMNYA

- Pertumbuhan global diperkirakan melambat di tahun 2023, hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya *extreme weather*, tingginya tingkat suku bunga, kebijakan fiskal yang relatif sempit.
- IMF di Januari 2023 memproyeksikan ekonomi global melambat 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023.
- Berbagai negara telah menunjukkan tanda-tanda penurunan pertumbuhan pada 2022 dan berlanjut di 2023.

Downside risks



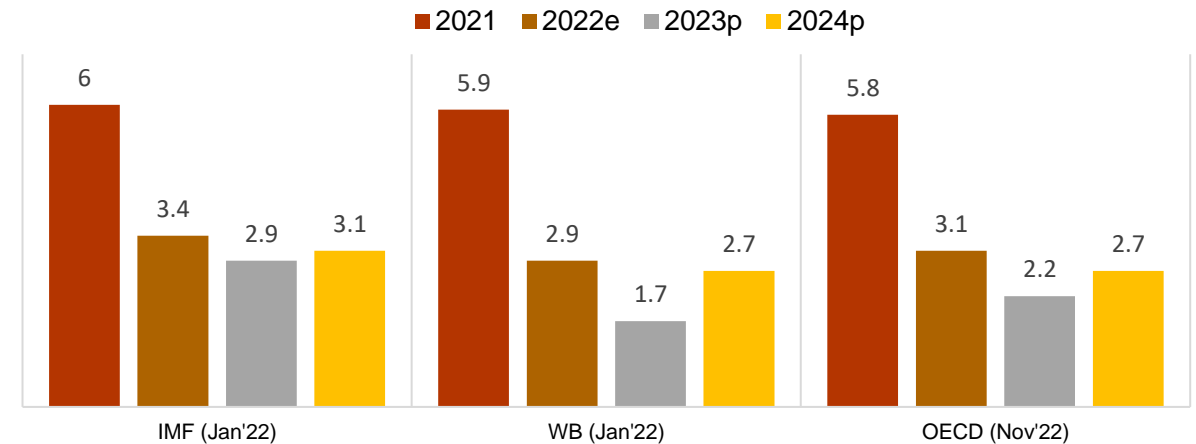
- Ketidakpastian **tensi geopolitik**
- Masih **Tingginya Tingkat suku bunga**
- Tekanan **Sektor Properti Tiongkok**
- **Policy space (fiskal)** relatif sempit
- Potensi terjadinya **extreme weather** dampak **climate change**



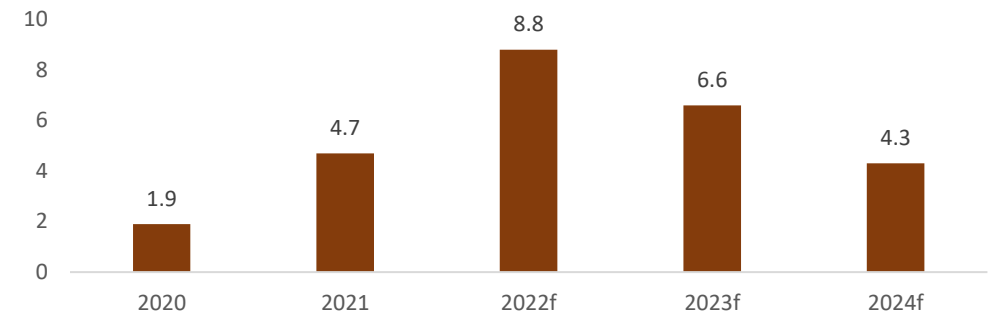
Upside risks

- Moderasi **Harga Komoditas**
- Penurunan **Laju Inflasi**
- Pelambatan Laju **Pengetatan Moneter**
- **Re-Opening Tiongkok Post Covid-19**
- Penguatan **pemulihan Asia**
- Potensi **new growth driver** (digital, **green economy**)

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI



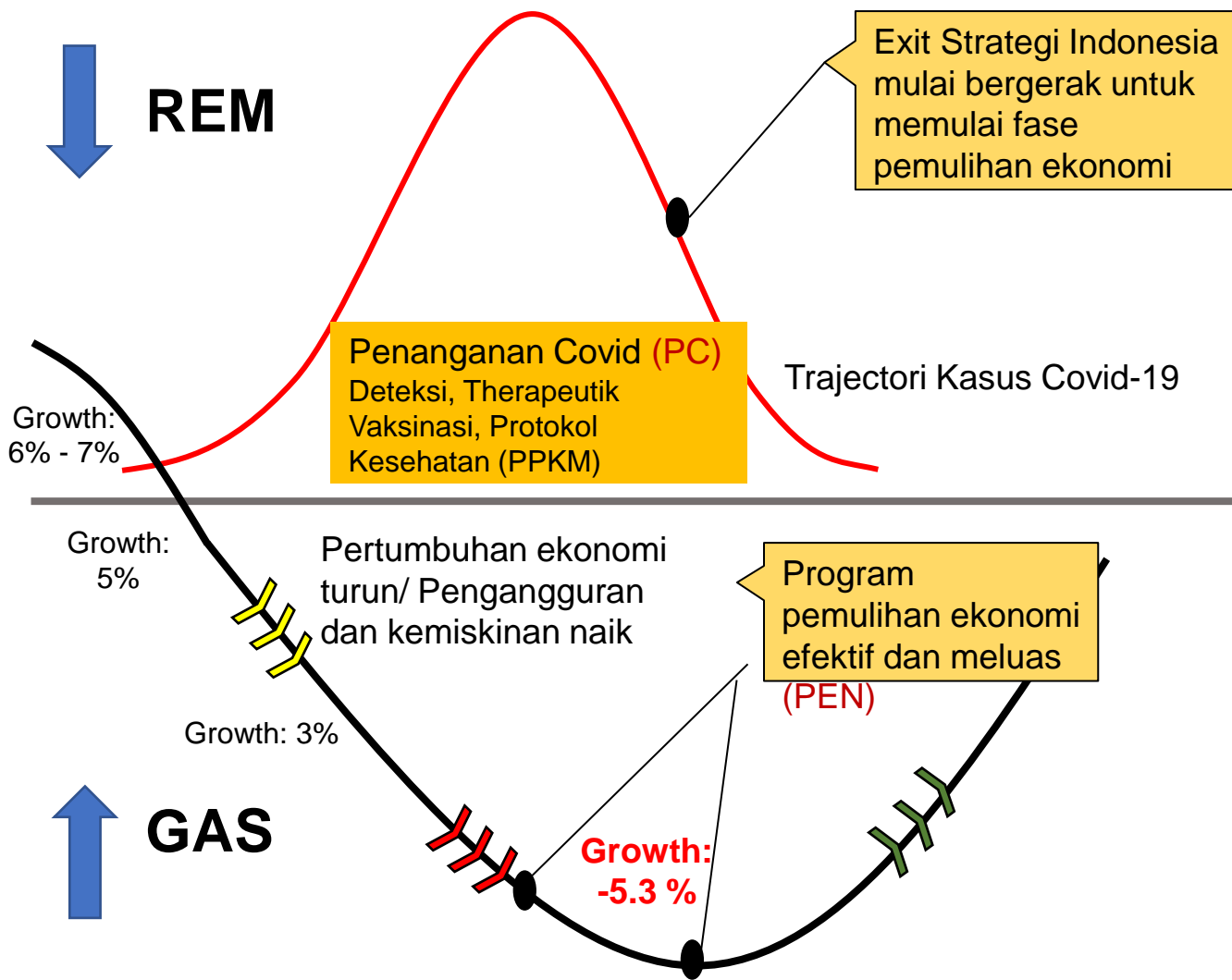
PROYEKSI INFLASI



Sumber: WEO IMF Januari 2023

KEBIJAKAN KONSTRUKTIF PCPEN, KUNCI KEBERHASILAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

Di tengah berbagai terpaan tantangan global, pemerintah telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan tetap menjaga penanganan pandemi berjalan secara efektif.



>445 juta vaksin COVID-19 telah diberikan (dosis utama dan booster). Indonesia telah memproduksi vaksin COVID-19 di dalam negeri, untuk memperkuat pasokan vaksin, antara lain Indovac yang dikembangkan oleh Bio Farma.

Keberlanjutan
Vaksinasi

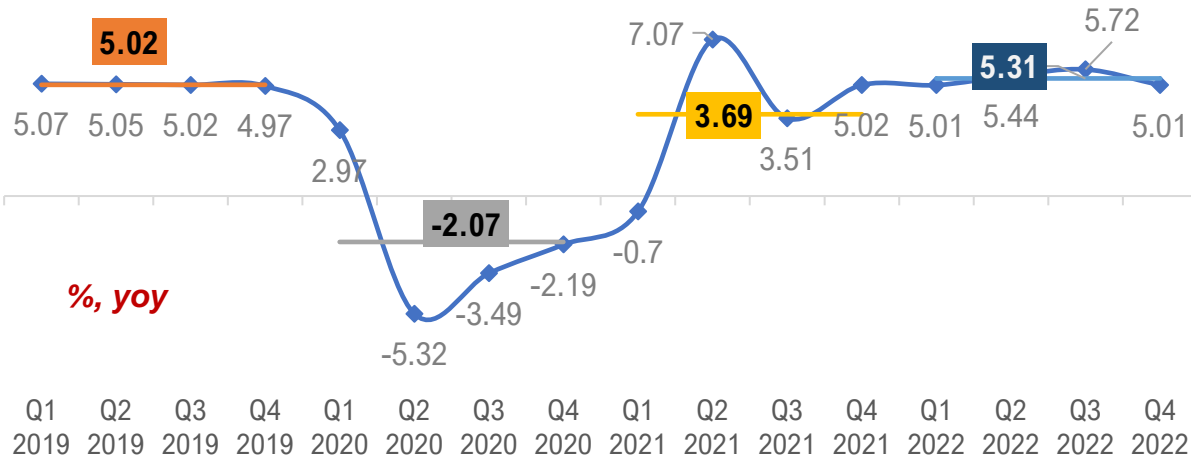
Pembukaan
PPKM

Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 secara resmi mengumumkan PPKM telah dicabut. Namun, status Pandemi di Indonesia tidak dicabut.

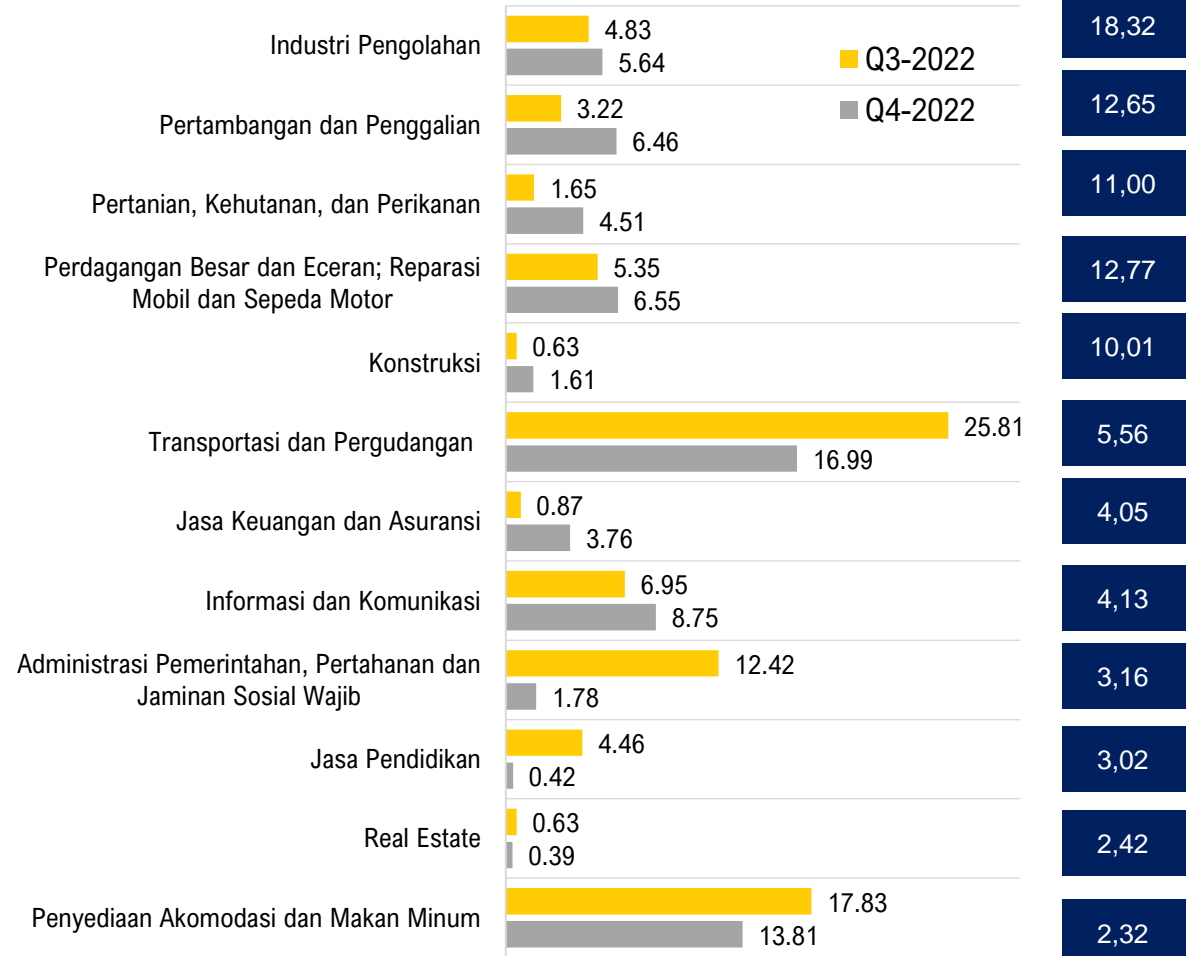
EKONOMI INDONESIA TAHUN 2022 TUMBUH SOLID, TERUTAMA DITOPANG KINERJA EKSPOR

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (YoY). **Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh solid sebesar 5,31% (CtC).** Kinerja ini dicapai meski ekonomi global terus mengalami periode pasang surut.

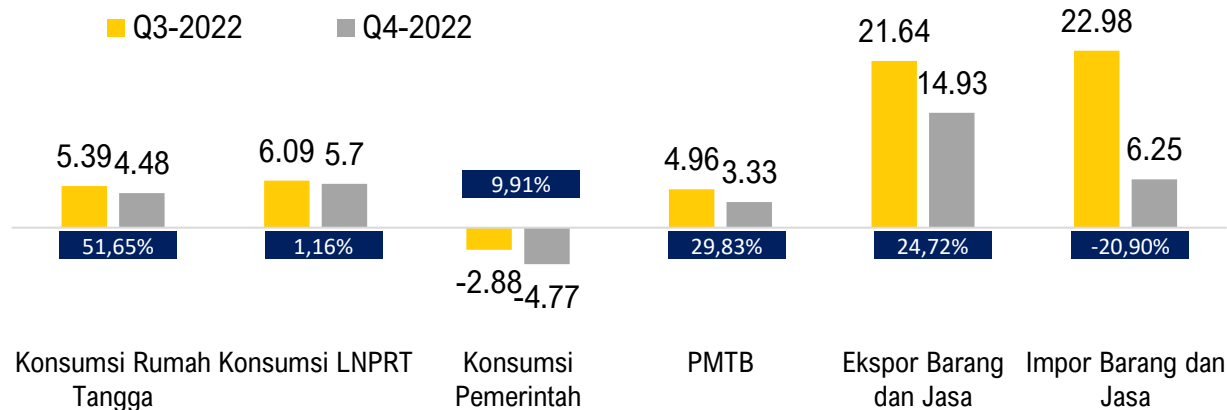
Pertumbuhan ekonomi secara tahunan sudah kembali ke level 5%,



Ditopang sektor utama yang masih tumbuh kuat, dan sektor berbasis mobilitas tumbuh impresif.

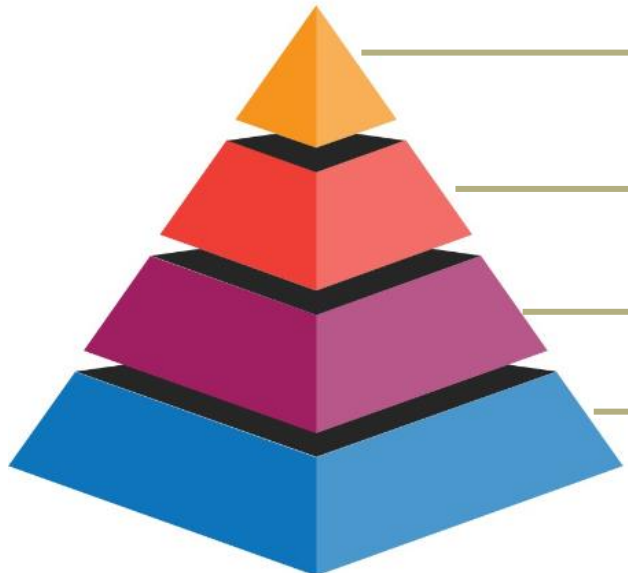


Didukung kinerja pengeluaran yang positif terutama ekspor yang masih tumbuh dua digit,



UMKM MENJADI KUNCI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Profil UMKM Indonesia



USAHA BESAR
5.637 Unit (0,01%)

USAHA MENENGAH
65.465 Unit (0,10%)

USAHA KECIL
798.679 Unit (1,22%)

USAHA MIKRO
64.601.352
Unit (98,67%)



65,5 Juta
Jumlah UMKM

26,71 juta unit usaha non-pertanian (Sensus Ekonomi, BPS 2016)



60,51 %
Kontribusi PDB

atau senilai:
Rp 9.580 T



96,92 %

Serapan Tenaga Kerja

atau sebanyak:
119,56 juta orang

Peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi



“Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan peningkatan efisiensi pada penggunaan input produksi modal dan tenaga kerja. **Modal sebagai input produksi dapat ditingkatkan melalui perluasan akses pembiayaan.** Adapun tingkat teknologi merupakan pengetahuan untuk memproduksi sesuatu dengan cara yang paling efisien, di mana ketika teknologi meningkat, maka efisiensi tenaga kerja juga meningkat”



60,03 %
Investasi Sektor UMKM

Investasi untuk sektor UMKM dari total investasi



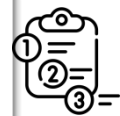
15,65 %
Ekspor Non Migas UMKM

Sektor UMKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor



KEBIJAKAN KUR TAHUN 2023

Plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran subsidi KUR di dalam APBN 2023, disertai Penambahan target debitur baru paling sedikit 1,76 juta debitur dan target debitur graduasi penyaluran KUR paling sedikit 2,36 juta debitur.



Kebijakan KUR Kembali ke Masa Sebelum Pandemi COVID-19

1. Suku bunga KUR kembali ke 6% tanpa tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3%
2. Target penyaluran KUR di sektor produksi kembali ditetapkan sebesar 60%
3. Kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp500 juta
4. Memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d. 31 Maret 2024 (sesuai POJK)



Kebijakan KUR Mendorong Graduasi Debitur KUR

- Penurunan suku bunga KUR Super Mikro dari 6% menjadi 3%
- Pembatasan maksimal akses KUR Mikro:
 - Sektor non-produksi dan sektor produksi non-pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: maksimal akses KUR Mikro sebanyak 2 (dua) kali
 - Sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 (empat) kali
- Suku bunga/margin KUR Mikro dan KUR Kecil naik secara berjenjang (subsidi bunga KUR sliding/menurun berjenjang) untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang:
 - Debitur baru akses KUR pertama kali sebesar 6%
 - Debitur berulang akses ke-2 kali sebesar 7%
 - Debitur berulang akses ke-3 kali sebesar 8%
 - Debitur berulang akses ke-4 kali sebesar 9%



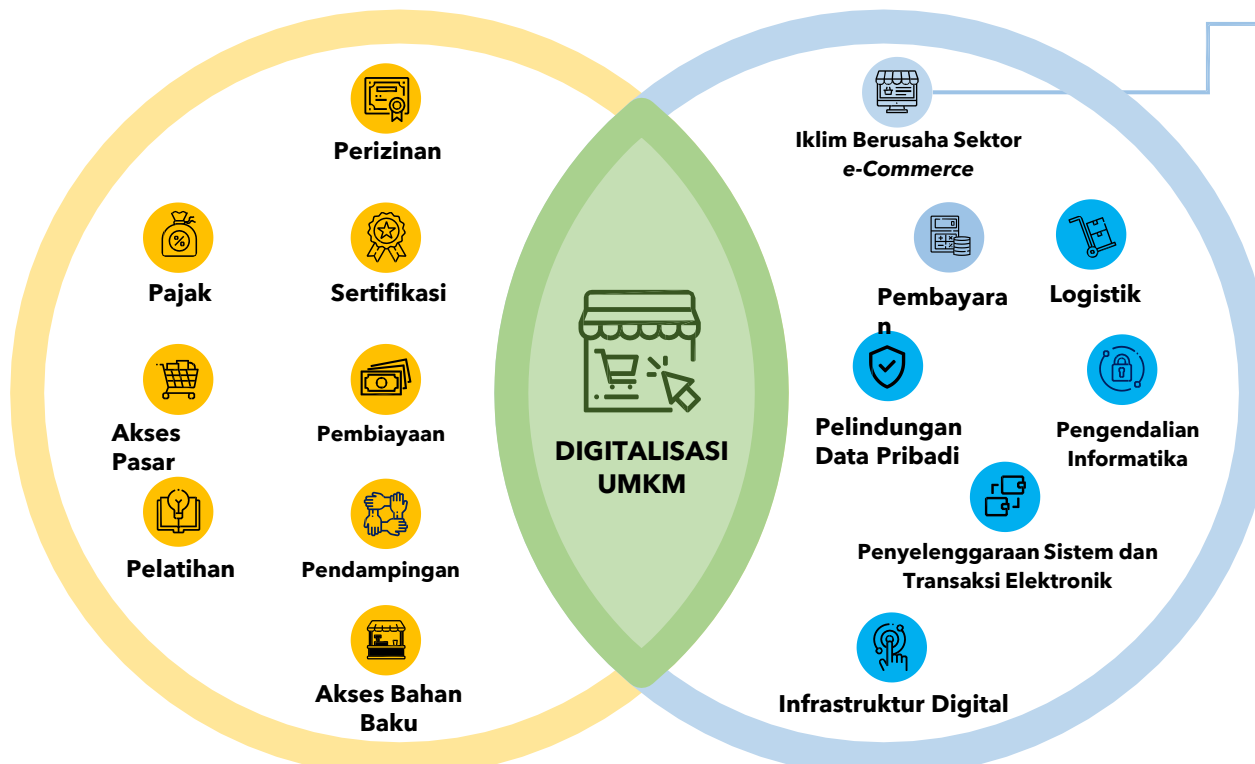
Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR

- Penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR s.d. Rp100 juta dengan pemberian sanksi tidak dibayarkan dan/atau pengembalian subsidi bunga/subsidi margin.
- Penegasan syarat calon Penerima KUR tidak pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial (kecuali kredit konsumen yang dikecualikan).
- Perubahan ketentuan terkait BPJS Ketenagakerjaan, Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp100 juta berubah frasa dari sebelumnya dapat menjadi wajib untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Penambahan kerja sama subrogasi pada PKS online system Penjaminan KUR.
- Penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR, dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023.
- Tambahan insentif GWM untuk penyaluran KUR

PENGUATAN FONDASI UMKM DALAM EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL

PENGUATAN EKOSISTEM UMKM

PENGUATAN EKOSISTEM E-COMMERCE



Isu **fair playing field** (offline-online, lokal-asing, formal-informal marketplace) antara lain:

- Predatory pricing bagi pelaku UMKM
- Kehadiran signifikan vs BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- Pajak digital
- Pengumpulan data e-commerce

Dukungan Pemberdayaan dan Akses Pasar UMKM

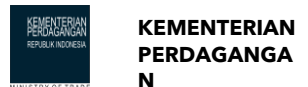


Identifikasi Peranan Lintas Sektor



Penguatan Aspek Enabler

- Pengendalian Informatika
- Infrastruktur Digital
- Pelindungan Data Pribadi dan Tata Kelola Data Non-Pribadi
- Penyelenggaraan dan Pengendalian Sistem dan Transaksi Elektronik
- Logistik



Tata Kelola E-Commerce

- Iklim Berusaha Sektor e-Commerce
- Perlindungan Konsumen
- Tata Kelola Perdagangan Dalam dan Luar Negeri (Impor Ekspor)



Pembinaan Pelaku UMKM

- Perizinan
- Sertifikasi
- Akses Pasar
- Akses Bahan Baku
- Pelatihan dan Pendampingan



Pembinaan Pelaku Industri

- Iklim Berusaha Industri Kecil, Menengah
- Akses Pasar
- Akses Bahan Baku
- Pendampingan



Tata Kelola Instrumen dan Kebijakan Fiskal

- Pajak
- Kepabeanan dan Cukai



Tata Kelola Sistem dan Penyelenggaraan Keuangan

Sumber: Kementerian Kominfo, 2021.

PERPRES No. 114/2020 tentang STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Diterbitkan 7 Desember 2020, menggantikan Perpres 82/2016



Berdasarkan Perpres 114/2020, tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah:



1
Mendorong pertumbuhan ekonomi



2
Mempercepat penanggulangan kemiskinan



3
Pengurangan kesenjangan antarindividu & antardaerah

Kelompok Sasaran



Masyarakat berpenghasilan rendah



5 Masyarakat Lintas Kelompok



Pelaku UMKM

Masyarakat Lintas Kelompok



Pekerja migran



Perempuan



Penyandang masalah kesejahteraan sosial
mantan napi, anak terlantar, disabilitas



Masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan



Pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda

CAPAIAN KELOMPOK KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF [RINGKASAN]

Pokja I Edukasi Keuangan

1.057 edukasi keuangan oleh K/L dengan > 7,7 juta peserta

4.585 edukasi keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan

Edukasi & literasi keuangan syariah bagi 2.000 ponpes

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan 1,3 juta peserta

Pengembangan **Learning Management System (LMS)**

Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021

Pokja II Hak Properti Masyarakat

7,3 juta tanah tersertifikasi dari program PTSL

Pemberdayaan SHAT kepada 120.485 orang

10.480 Sertifikasi Produk Halal

394 fasilitas HAKI

Peningkatan akses pembiayaan UMKM

Implementasi model bisnis pemberdayaan usaha syariah

Pengembangan keuangan inklusif kelompok subsisten

Pokja III Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

26,4 juta uang elektronik

851.554 agen LKD dan 1,4 juta agen Laku Pandai

14,37 juta merchant QRIS, dimana 95% merupakan UMKM

47,4 juta rekening pelajar (simpler)

Generic model kredit lawan rentenir - TPAKD

Agen LKNB: agen Nabung Emas dan agen PosPay

Fintech (termasuk fintech syariah)

Pokja IV Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah: PKH, sembako nontunai, Kartu Tani, KIP Kuliah, KUSUKA, Prakerja

Pembiayaan Bersubsidi: KUR, UMi, Mekaar, Baznas Microfinance (termasuk pembiayaan syariah)

Pengembangan kebijakan asuransi pertanian/nelayan dan Peternakan (AUTP, AUTS/K)

Elektronifikasi layanan pemda

Pokja V Perlindungan Konsumen

Presentase penyelesaian pengaduan konsumen sebesar 93,99%

Pengembangan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Optimalisasi Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Terintegrasi

Sosialisasi perlindungan konsumen keuangan (termasuk syariah)

Pokja V Kebijakan dan Regulasi

Penerbitan Permenko 4/2021 tentang Pelaksanaan SNKI

Koordinasi dengan Pokja DNKI dan pemda terkait review kebijakan

Penyusunan regulasi keuangan inklusif bagi Pemerintah Daerah / TPAKD

Update regulasi terkait Securities Crowd Funding (fintech)

Kajian terkait Lembaga Keuangan Mikro

*Detail capaian kelompok kerja tahun 2022 terlampir

Pokja VII Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Utilisasi Palapa Ring dan pengembangan BTS

Pengembangan Peta Akses Keuangan Inklusif skala nasional, LokasiKU

Pengembangan BI Fast

Pengembangan sistem informasi pendukung keuangan inklusif dan pengembangan UMKM

Rilis aplikasi Agree, marketplace ekosistem digital hilir pertanian

Sinergi oleh
27 K/L
anggota DNKI



STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

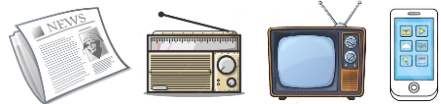
Melalui Konvergensi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta melalui Perbaikan data sasaran dan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.



SELURUH STAKEHOLDER MEMILIKI PERAN DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN



Academic (Universitas, Pesantren, dan Sekolah Islam): Perlunya memperkuat koordinasi dengan akademisi untuk memaksimalkan implementasi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah. Universitas, Sekolah Islam, dan Pesantren fokus pada kurikulum keuangan inklusif dan keuangan syariah



Media: dibutuhkan sebagai penghubung antar stakeholder terkait dan diseminasi kepada masyarakat



Government: peran pemerintah adalah sebagai fasilitator sekaligus sebagai regulator.



Business (LJK Syariah): Bagi Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah perlu memastikan tersedianya jasa dan layanan keuangan syariah yang aman dan handal serta mampu melayani segemen prioritas. Sementara diperlukan pula komitmen kemitraan/pendampingan dari industri guna pemberdayaan masyarakat.



Non Government Organisation: dibutuhkan ketersediaan pelaku usaha mikro untuk pemberdayaan melalui skema kemitraan yang mendorong keuangan inklusif.



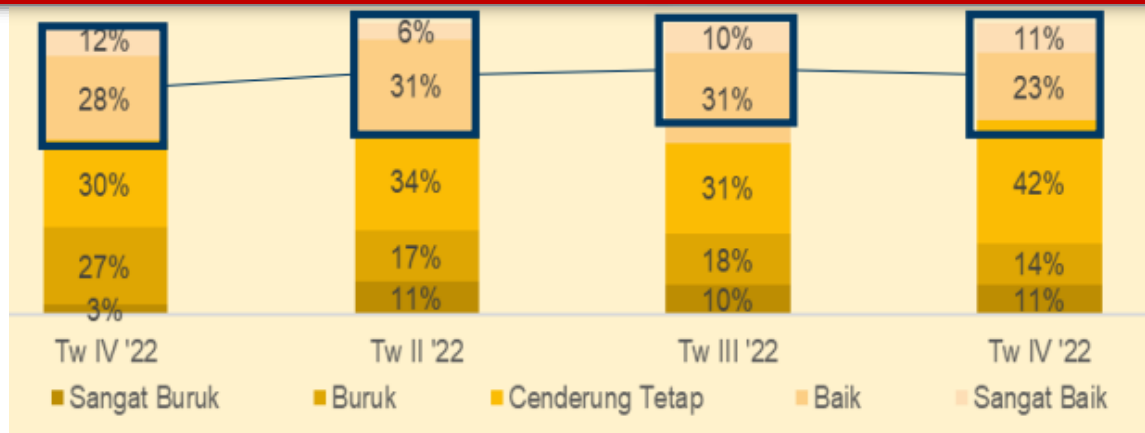
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

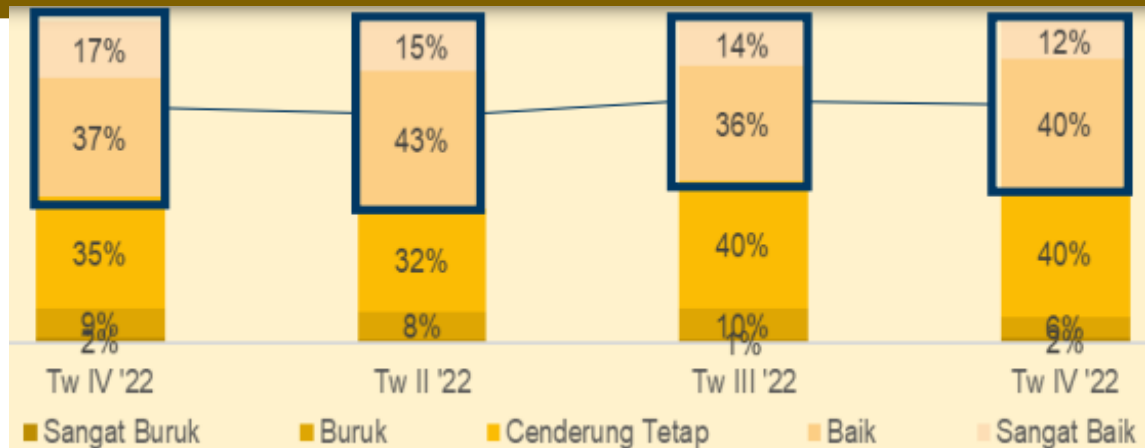
UMKM : Seiring Pemulihan Ekonomi Nasional, Kinerja UMKM Terus Membaik

Hasil survey Bank Indonesia memperlihatkan kondisi sektor UMKM terus mengalami perbaikan jika dibandingkan saat pandemi. Kondisi usaha UMKM berorientasi domestik membaik sementara kondisi ekspor sedikit menurun. Demikian pula survey BMSI, dimana ekspansi bisnis UMKM terus berlanjut yang tercermin dari indeks bisnis UMKM yang tetap tumbuh namun melambat ke level 103,2 pada Q3-2022. Kondisi ini terdorong dari meningkatnya permintaan masyarakat seiring pandemi yang terkendali.

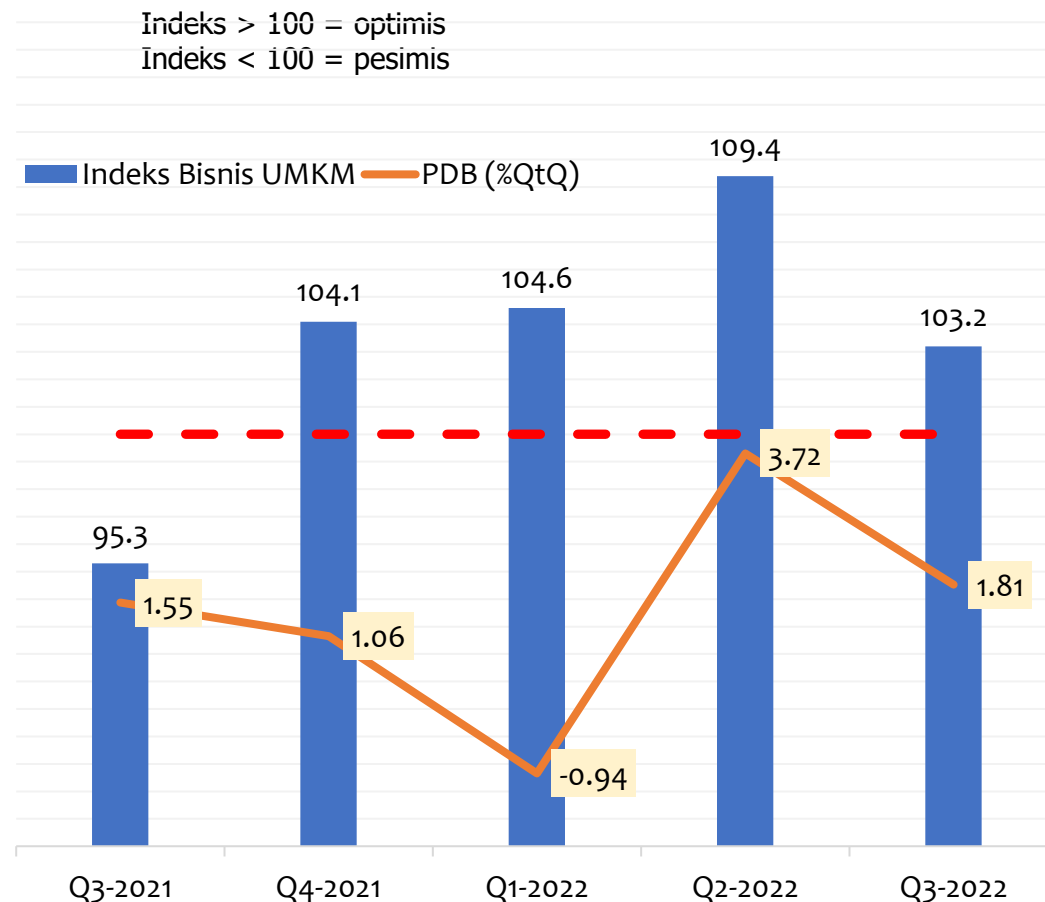
Usaha Ekspor



Usaha Domestik



Indeks Aktivitas Bisnis UMKM



Sumber: Survey BRI Micro & SME Index (BMSI) pada 6000 responden di 33 provinsi

Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi Keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari **kepemilikan** maupun **penggunaan** akun/rekening

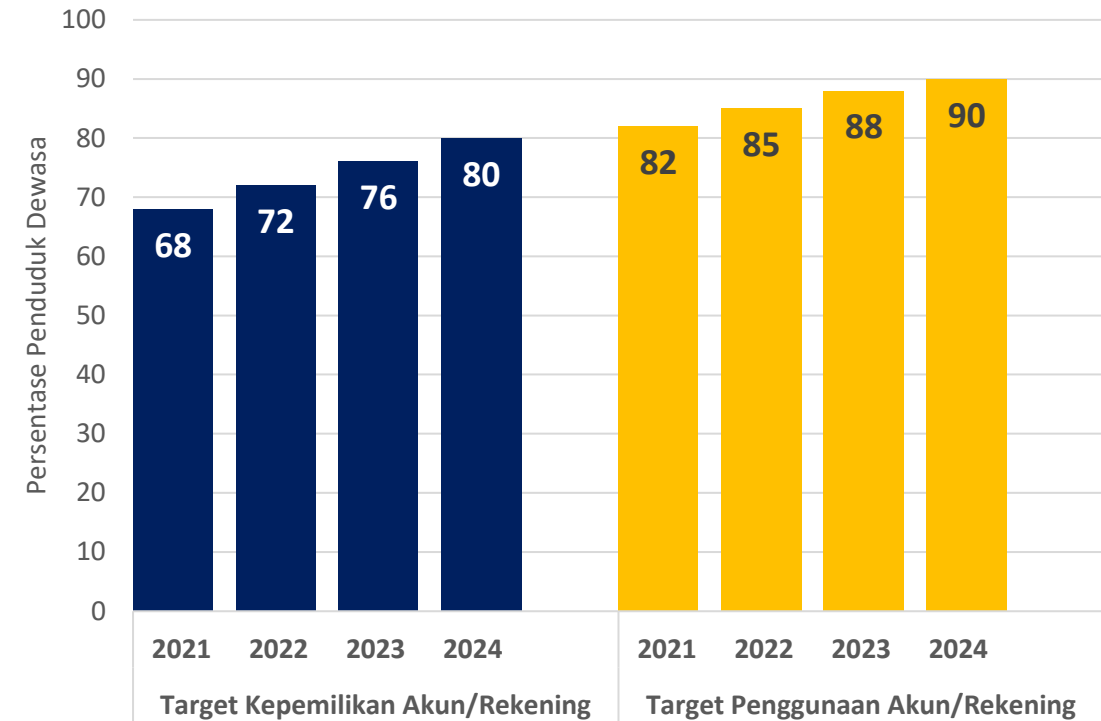
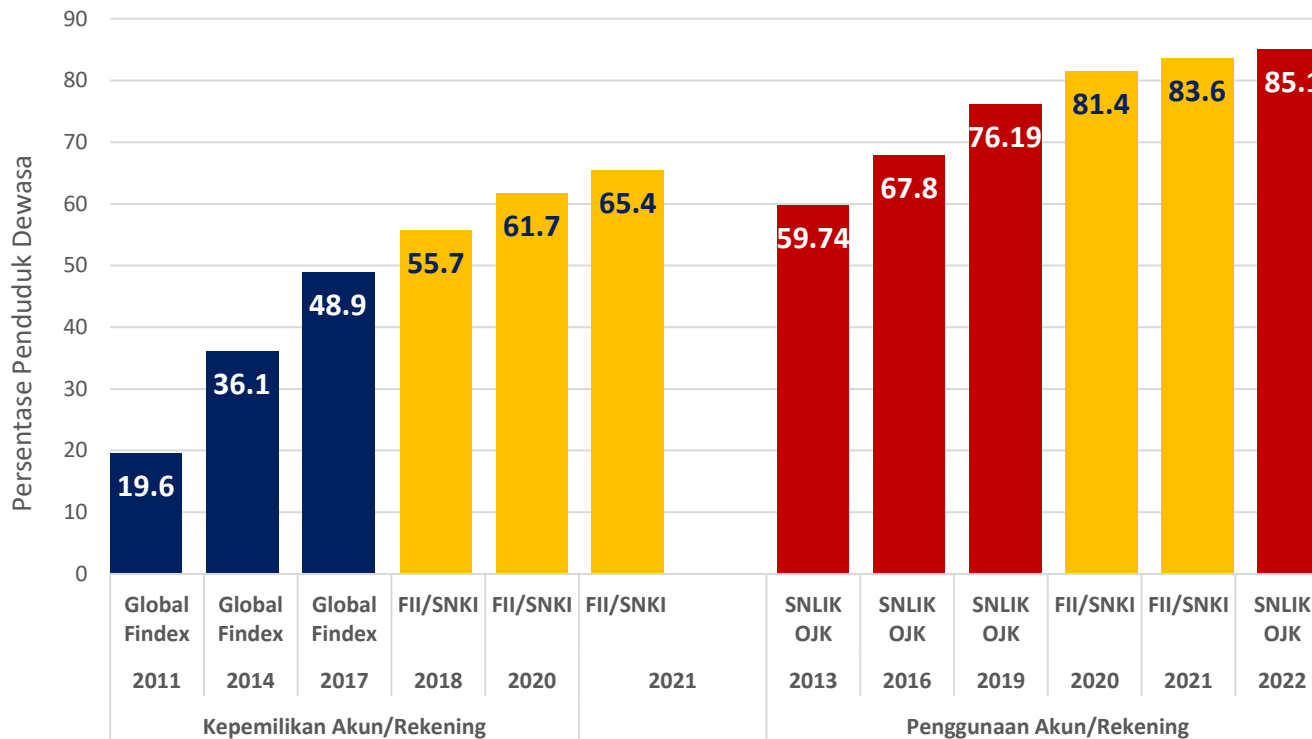
Terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam kepemilikan akun pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,7 poin persentase. Sementara penggunaan akun meningkat sebesar **1,5 poin persentase pada tahun 2022**, dari 83,6% menjadi 85,1%.

Tingkat Kepemilikan Akun

Tingkat Penggunaan Akun

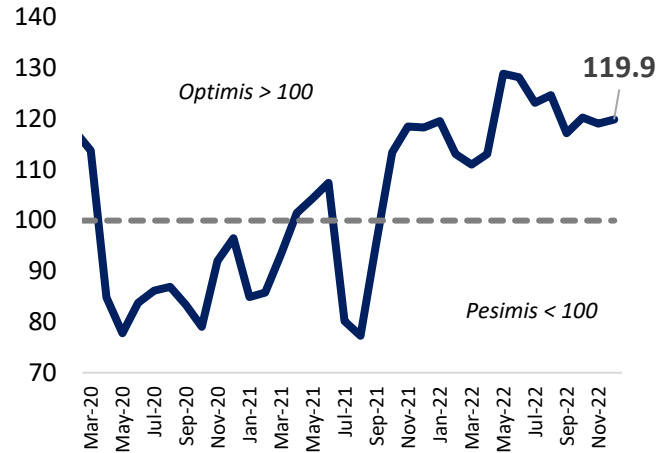
Target Kepemilikan Akun

Target Penggunaan Akun

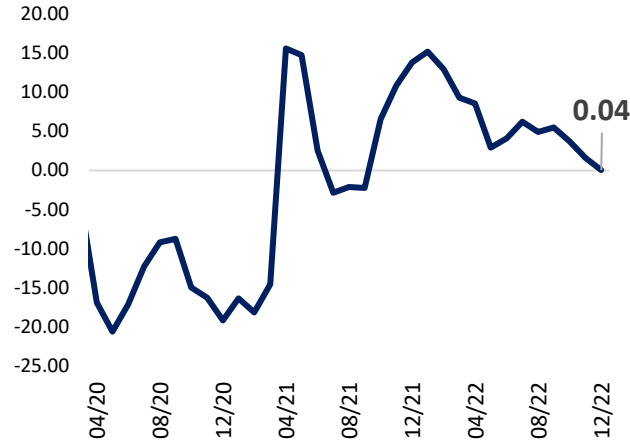


BERBAGAI LEADING INDIKATOR RIIL DAN EKSTERNAL MENUNJUKKAN PROSPEK YANG BAIK

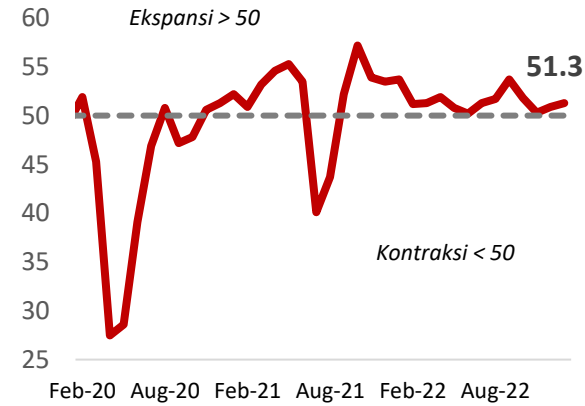
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN MASIH DALAM LEVEL OPTIMIS



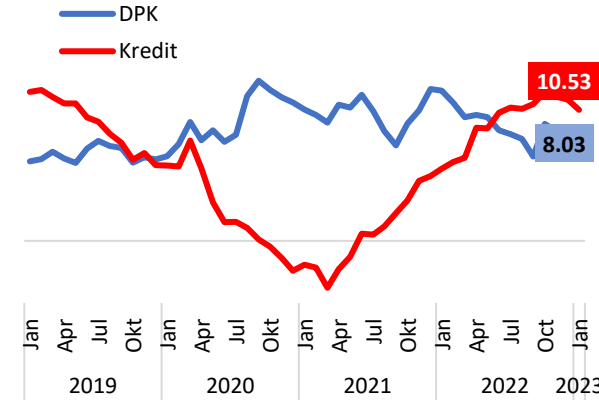
PENJUALAN RIIL (%YOY) MASIH TUMBUH DALAM ANGKA POSITIF



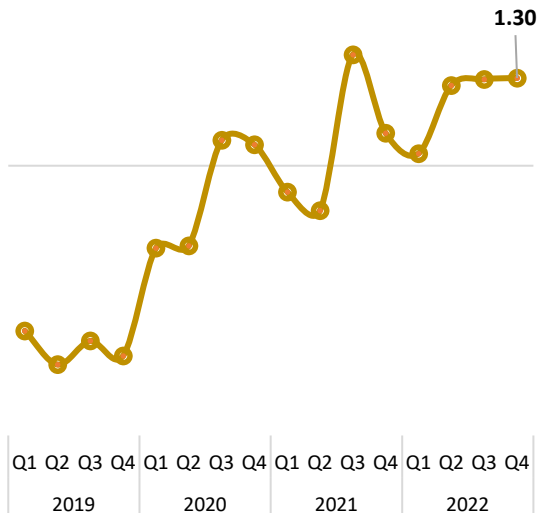
PMI MANUFAKTUR KONSISTEN EKSPANSIF



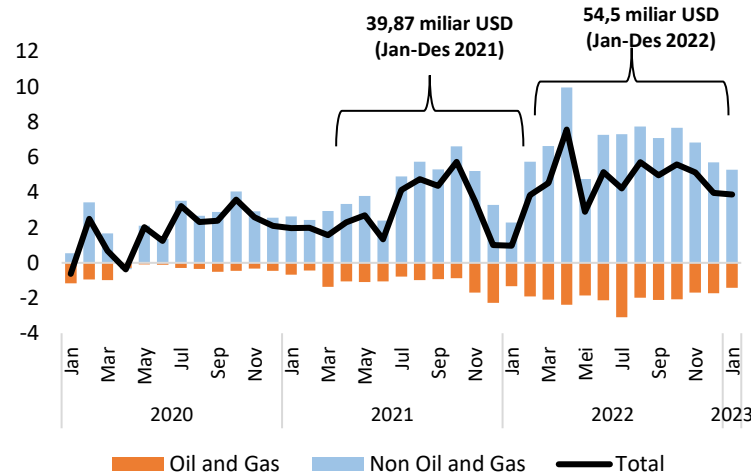
PERTUMBUHAN KREDIT DAN DPK MENUNJUKKAN LIKUIDITAS PERBANKAN MASIH TERJAGA



TRANSAKSI BERJALAN (% PDB) KEMBALI MENCATAT SURPLUS



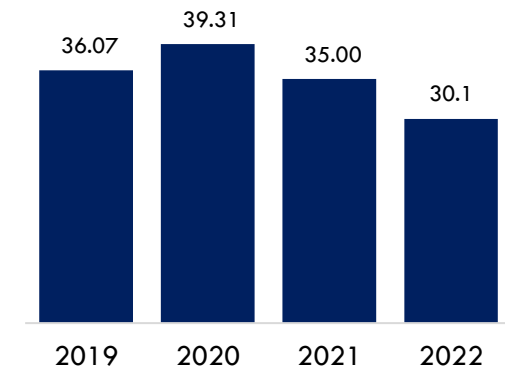
NERACA PERDAGANGAN MASIH MELANJUTKAN TREN SURPLUS



CADANGAN DEvisa MENINGKAT



RASIO ULN TERHADAP PDB (%) DALAM LEVEL AMAN





**MOU KADIN INDONESIA DENGAN KEMENKO PEREKONOMIAN TENTANG KEMITRAAN
MULTIPIHAK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
SENIN, 3 OKTOBER 2022**

